

RENCANA KINERJA

2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 telah disusun sebagaimana mendasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ketentraman dan ketertiban dapat terjaga, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2026 mengenai penjabaran rincian pada program dan kegiatan agar tercapai tujuan dan sasaran sesuai prioritas yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja yang sedang berjalan dan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2026 ini.

Demikian Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dan diharapkan dapat mencapai sasaran dan target yang direncanakan secara maksimal sehingga memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi dan masyarakat.

Pasuruan, 25 September 2025



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**

RIDO NUGROHO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19680211 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V : PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Kaidah Pelaksanaan	50
4.3 Pengendalian dan Evaluasi	50

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum fungsi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya berkenaan dengan fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi meliputi aspek – aspek pertahanan kemanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan trantibum tertuang dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c yang diamanatkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, demikian pula Pasal 148 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, sedangkan dalam Pasal 149 disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 jelas sekali bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu alat Negara dan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi stabilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan memiliki kewajiban untuk mendukung dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah “melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tahu, mengerti dan memahami norma-norma hukum, agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dan melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan pernyataan tujuan adalah: *“Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”*.

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi ada 3 yaitu: *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Meningkatkan Penanganan Kebakaran Secara Efektif, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”*.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, terdapat beberapa indikator-indikator yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi. Berdasarkan pernyataan tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kinerja antara lain: Indikator Kinerja Tujuan adalah “Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada)”. Indikator Sasaran diantaranya : (1) Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), (2) Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam waktu tanggap (response time), (3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Tentunya dalam pencapaian sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan tersebut bukan berarti tanpa adanya kendala. Kendala atau masalah yang kerap dihadapi dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan perda serta solusi pemecahannya akan diuraikan dengan jelas dalam laporan ini, namun secara garis besar, masalah yang kerap terjadi antara lain: (1) Jumlah pelanggaran perda / perkada yang semakin meningkat, (2) Data perijinan yang dimiliki Satpol PP tidak akurat sehingga menyulitkan dalam penindakan Peraturan Daerah, (3) Legalitas Tempat Hiburan di wilayah Kabupaten Pasuruan, (4) Sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi teknis yang sesuai kewenangannya, (5) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan (6) Optimalisasi peran satlinmas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Upaya-upaya antisipatif yang telah dilakukan secara garis besar antara lain: (1) Meningkatkan kegiatan Pencegahan gangguan trantibum melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban, meningkatkan kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada dan meningkatkan sosialisasi tentang trantibum dan peraturan daerah kepada masyarakat; (2) Mengumpulkan data pendukung untuk mempermudah melakukan penindakan Perda; (3) mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai legalitas tempat hiburan di wilayah Kabupaten Pasuruan; (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sinergitas program kegiatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pasuruan;

(5) pembentukan dan pengukuhan relawab kebakaran pada desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan serta rencana penambahan Pos pemadam kebakaran 1 unit sepada titik wilayah manajemen kebakaran dengan resiko kebakaran tinggi; dan (6) Membentuk struktur organisasi linmas di tingkat desa/ kelurahan serta Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggota satlinmas yang ada di desa / kelurahan secara berkala.

VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai Tingkat kabupaten / kota.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, melalui jenjang perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan tahunan (RKPD). RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya antara lain meliputi dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menjadi pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yang sesuai fungsi / bidang kewenangannya. yaitu pada

Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai – nilai keagamaan dan kebudayaan dengan indikator tujuan adalah “Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) - IUP”.

Sedangkan sasaran dari RPJMD adalah

Sasaran : Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal dengan indikator tujuan adalah “Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) - IUP”.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen melaksanakan amanat undang – undang tersebut yaitu mewujudkan ketertiban umum dan kentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat di daerah, yang artinya pemerintah daerah maupun mayarakat daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan teratur. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa aman, tentram dan tertib

serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan telah menetapkan berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan dijabarkan setiap tahun kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan kinerja tahunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari implementasi pencapaian tujuan dan sasaran satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis ke dalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan meliputi :

- a. Persiapan penyusunan.
- b. Penyusunan rancangan awal.
- c. Penyusunan rancangan.
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir.
- f. Penetapan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagai sinkronisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap terhadap perubahan dan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Permendagri 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

24. Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
 36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 39. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 509 Seri D);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 349);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025;
48. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, No. Reg 99-2/2025).
49. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025- 2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah Untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yaitu meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang ketentraman dan kertiban umum tahun 2026 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk dimasukkan dalam dokumen KUA-PPAS Tahun 2026 yang

nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah:

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai Renstra perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran
- d. Menjamin terwujudnya kegiatan Satuan Polisi Pamong bisa berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraian ringkas mengenai Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan proses penyusunan Renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum, peraturan perundangan dan ketentuan serta peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Garis besar penulisan dalam isi dokumen Rencana Kerja

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
Menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dan menyajikan data analisis kinerja pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
Menyajikan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
Menyajikan isu penting disertai dengan analisis faktor internal dan eksternal potensi dan permasalahan dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
Menyajikan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menyajikan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
Menyajikan tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan menyajikan sinkronisasi indikator sasaran RPD dan IKU.
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

- 3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026;
- 3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026;
Menyajikan data program pendukung prioritas pembangunan daerah
- 3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis;
Menyajikan data matrik perencanaan pembangunan tahunan pada RKPD Tahun 2026
- 3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah;
Menyajikan program pendukung inovasi perangkat daerah Tahun 2026;
- 3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IUP RPJPD
Menyajikan program pendukung IUP RPJPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menyajikan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

BAB V : PENUTUP
Menyajikan Kesimpulan, Kaidah Pelaksanaan serta Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) periode Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pengukuran capaian terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) yang telah tersusun dan tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan menyajikan data-data hasil pengukuran kinerja pada tiap-tiap indikator kinerja, program dan kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dituangkan dalam **Tabel (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025**, sebagaimana terlampir.

Analisis dari capaian kinerja masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan dibandingkan dengan target dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan target capaian renstra sampai dengan tahun 2025 sebesar 95% dengan perkiraan capaian renstra sampai dengan tahun 2025 adalah masih 94,94%
- Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan target capaian renstra sampai dengan tahun 2025 adalah 100% dengan perkiraan realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 100% sehingga perkiraan tingkat capaian target renstra adalah sebesar 100%.
- Untuk target kegiatan pada akhir periode Renstra 2024-2026 rata – rata adalah 100% dengan perkiraan realisasi sampai dengan tahun 2025 nilai rata – rata adalah 33,94% sehingga diperoleh Tingkat capaian target renstra adalah sebesar 33,94 %.

Analisis dari capaian kinerja dibandingkan dengan target terhadap hasil pelaksanaan renja pada Tahun 2025 serta penetapan target kinerja Tahun 2026 dan prakiraan capaian Tahun 2027 ditunjukkan pada **tabel 2.1.A Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025** sebagaimana terlampir.

Besaran Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ada beberapa yang masih dibawah 100% dan ada yang sudah mencapai 100%. Adapun faktor Pendorong tercapainya kinerja program kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

- Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
- Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja
- Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Selain faktor pendorong ada pula faktor yang menghambat tidak tercapainya kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

- Adanya pergeseran anggaran di tahun berjalan akibat refocusing belanja
- Kapasitas SDM aparatur Satpol PP yang tidak merata
- Adanya perubahan kebijakan ditahun berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen rencana strategis Tahun 2025 – 2029. Indikator kinerja tujuan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelaksanaan kinerja pelayanan perangkat daerah Tahun 2026 adalah “*Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada)*”. Formula perhitungannya yaitu Jumlah Gangguan Trantibum dan jumlah pelanggaran Perda/Perkada tahun 2025 dikurangi Jumlah Gangguan Trantibum dan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2026 dibagi Jumlah Gangguan Trantibum dan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2025.

Ada 3 (tiga) indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
2. Sasaran : Meningkatnya Penanganan Kebakaran Secara Efektif, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan :
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan Kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2021. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, berikut disajikan pada tabel berikut :

a. Indikator SPM

- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota.
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan PD disajikan dalam **Tabel (2.2). Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja**, sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang cukup luas dan terbagi dalam 24 wilayah kecamatan serta 365 desa / kelurahan, sumber daya alam, potensi daerah dan kondisi demografis penduduk yang cukup beraneka ragam sangat dimungkinkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat semakin berupaya untuk berperan aktif secara profesional dan proporsional dengan memberikan mediasi, motivasi dan selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pada analisis terhadap faktor internal, eksternal, potensi yang ada dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi tahun 2026, meliputi :

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dapat menghambat kelancaran proses penegakan peraturan daerah. Karena PPNS Satpol PP yang memiliki kewenangan memberikan pengarahan kepada Masyarakat maupun badan hukum yang melanggar, melakukan penertiban non yustisial, penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan secara preventif, persusif dan represif secara humanis.
2. Belum terpenuhi jumlah ideal personal Satpol PP dan terbatasnya jumlah pegawai Satpol PP yang berstatus PNS dimana berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dilapangan. Karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kualifikasi (minimal telah lulus diklat dasar Pol PP). Sedangkan Anggota Satpol PP yang berstatus tenaga honorer atau non PNS tugasnya hanya membantu.
3. Tingginya beban kerja dan resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh personil Polisi Pamong Praja;
4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dimana berkaitan dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi belum tercapai pada seluruh penanganan kejadian kebakaran wilayah Kabupaten Pasuruan dikarenakan pos layanan damkar hanya terpusat pada kantor rasi (belum memiliki pos – pos yang lain yang berada pada titik wilayah manajemen kebakaran yaitu wilayah yang dapat dijangkau oleh pos pemadam kebakaran dengan resiko kebakaran yang tinggi)

5. Terbatasnya tenaga pemadam kebakaran untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang ditempatkan pada pos layanan pemadam kebakaran.

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang belum disesuaikan dengan kondisi sekarang
2. Belum terbentuk sinergitas antara Satpol PP dengan instansi terkait yang sesuai kewenangannya.
3. Tingkat kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap hukum (Perda dan Perkada) masih rendah;
4. Belum terbangunnya forum komunikasi dan kemitraan antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan Masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas dan penanganan atas gangguan yang terjadi
6. Percepatan pembangunan sektor industri tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja berpotensi menimbulkan munculnya usaha-usaha mikro non formal yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum;
7. Kemajuan pembangunan sektor industri yang kurang memperhatikan ketentuan penataan ruang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta merugikan Pemerintah Daerah;
8. Adanya kesenjangan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur menyebabkan tingginya permasalahan-permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berpotensi melanggar Perda dan Perkada;

Potensi dan peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan di tahun 2026 meliputi:

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menuntut pemerintah daerah untuk segera

- melakukan penyesuaian struktur kelembagaan yang lebih profesional;
2. Perubahan struktur kelembagaan Satpol PP memungkinkan untuk melakukan penambahan jumlah personil dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk pembentukan UPT di Kecamatan;
 3. Ketentuan tentang standarisasi / syarat wajib menjadi anggota Satpol PP (Pasal 15 PP No. 16 Tahun 2018) menjadi faktor pendukung satuan kerja untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 4. Bertambahnya fungsi Satpol PP dibidang pemadam kebakaran memberikan peluang bagi satuan kerja untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat;
 5. Pemenuhan jumlah ideal personil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2012 perlu didorong;
 6. PPNS perlu ditambah secara bertahap;
 7. Pembentukan Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mendorong percepatan efektifitas penegakan Perda / Perkada.
 8. Pemenuhan Sarana Prasarana Operasional Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
 9. Penambahan Pos Layanan Damkar dalam wilayah manajemen kebakaran dengan memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi waktu tanggap (respon time) dalam setiap penanganan kejadian kebakaran beserta sarana prasarana pendukung operasional kegiatan.
 10. Penambahan personil pemadam kebakaran yang bertugas di pos layanan pemadam kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Kondisi tertib, tentram dan aman menjadi kebutuhan dasar masyarakat;
2. Adanya dukungan dari instansi-instansi yang terkait dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat

- memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
3. Tingginya tuntutan masyarakat perihal maraknya gangguan PMKS (prostitusi, gepeng, peredaran minuman keras) mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kinerja dibidang penanggulangan PMKS;

Untuk menghadapi berbagai tantangan pada tahun-tahun mendatang dan sebagai upaya peningkatan profesionalisme organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan kerja yang membidangi penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan dan mengatur kembali serta meningkatkan status kelembagaan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Bentuk kinerja pelayanan PD diuraikan dalam tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha.
2. Adanya usaha tempat hiburan (karaoke) yang berkedok warung kopi di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang rawan terjadi transaksi miras dan praktek prostitusi.
3. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan apabila dibandingkan dengan cakupan luas wilayah Kabupaten Pasuruan.
4. Kurangnya koordinasi dan sinergi program kegiatan dengan instansi teknis terkait untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggar perda, misal : pada penanganan Bangunan Liar, PKL dan anak jalanan.
5. Belum optimalnya mutu layanan SPM sub urusan kebakaran dalam pemenuhan waktu tanggap (respon time) pada setiap penanganan kejadian kebakaran dikarenakan luas nya wilayah yang ditangani dengan keberadaan pos layanan yang terpusat pada kantor rasi.

Tingkat kinerja pelayanan diukur dengan mengacu pada indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Indikator ini membandingkan antara jumlah gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada tahun sebelumnya dengan jumlah gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada pada tahun berjalan. Harapan ideal pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kinerja ini adalah Satpol PP dapat menangani dan menyelesaikan seluruh pelanggaran perda yang ada atau tingkat pencapaian Penegakan Peraturan Daerah sebesar 100%.

Namun mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dan atas dasar pertimbangan kemampuan/potensi aparatur serta kendala permasalahan yang dimungkinkan akan menjadi hambatan, maka pada Tahun 2026 Satpol PP telah menetapkan target pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 31%.

b. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).

Indikator ini menghitung Total dari Skoring 3 Dimensi 7 sub dimensi dengan 39 indikator. Adapun 3 Sub Dimensi beserta pembobotannya meliputi : Strategi (bobot 0,198), SDM (bobot 0,490) dan Sistem (bobot 0,312). Untuk 7 Sub Dimensi diantaranya : Sub Dimensi Penegakan Perda (0,333), Sub Dimensi Penyelenggaraan trantibum (0,667), Sub Dimensi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (bobot 0,5), Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas SDM (bobot 0,5), Sub Dimensi Sarana dan prasarana (bobot 0,25), Sub Dimensi Perencanaan dan

Anggaran (bobot 0,5) serta Sub Dimensi Akuntabilitas (bobot 0,25). Target nilai IPKKU tahun 2026 adalah 98,50

2. **Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam waktu tanggap (response time)**

Indikator ini membandingkan antara Jumlah layanan penanganan kebakaran yang memenuhi waktu tanggap (respon time) 15 menit dengan Jumlah layanan penanganan kebakaran. Waktu tanggap atau response time kebakaran adalah waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 4 terkait mutu layanan dasar menyebutkan bahwa tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

3. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Target Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebesar 82,6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah didapatkan dari Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal.

Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan kualitas penanganan terhadap pelanggaran Perda / Perkada.
3. Meningkatkan ketaatan dan Kepatuhan masyarakat terhadap Perda / Perkada.
4. Meningkatkan mutu layanan penanganan damkar dalam waktu tanggap (responsetime).

Penanganan dan penindakan terhadap jumlah pelanggaran Perda/Perkada sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dikarenakan sudah menjadi komitmen yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Bupati Pasuruan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk menindak seluruh pelanggaran perda yang terjadi. Namun masih ada hambatan terjadi dalam rangka menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah / peraturan bupati sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun uraian permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berdasarkan tugas dan fungsi disajikan dalam tabel sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
1	Masih banyaknya kasus pelanggaran Perda / Perkada di Kabupaten Pasuruan	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha.	➤ Meningkatkan kualitas penanganan terhadap pelanggaran Perda / Perkada. ➤ Meningkatkan ketaatan dan Kepatuhan masyarakat terhadap Perda / Perkada

3	Keberadaan Tempat Hiburan di wilayah Kabupaten Pasuruan	Adanya usaha tempat hiburan (karaoke) yang berkedok warung kopi di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang rawan terjadi transaksi miras dan praktek prostitusi	➤ Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha tempat hiburan (karaoke) dan usaha warung kopi yang ada di Kabupaten Pasuruan.
4	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda / Perkada yang belum optimal	Kurangnya koordinasi dan sinergi program kegiatan dengan instansi teknis terkait untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggar perda, misal : pada penanganan Bangunan Liar, PKL dan anak jalanan.	➤ Optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam bentuk kegiatan Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban ➤ Meningkatkan sinergitas program kegiatan bersama instansi teknis terkait ➤ Pembentukan Satgas Linmas tingkat Kabupaten dalam rangka membantu Penyelenggaraan Tibumtranmas dan sebagai deteksi awal adanya pelanggaran Perda / Perkada di wilayah.

5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Belum optimalnya layanan penanganan kejadian kebakaran	➤ Adanya Tambahan Pos pemadam kebakaran beserta sarana prasarana pendukung pada titik wilayah manajemen kebakaran dengan resiko kebakaran tinggi ➤ Tersedianya relawan pemadam kebakaran pada setiap desa / kelurahan di Kabupaten Pasuruan.. ➤ Tersedianya personil pemadam kebakaran yang bertugas di pos layanan pemadam kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran. ➤ pemberian tunjangan resiko kerja/ Tunjangan kondisi kerja untuk petugas dikarenakan pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi seperti kebakaran atau kecelakaan serta karena kondisi kerja yang ekstrem seperti suhu tinggi, asap dan kebisingan
---	--	--	---

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 diantaranya :

1. Meningkatkan monitoring / pengawasan atas kepatuhan terhadap Perda / Perkada.
2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Perda / Perkada.
3. Terbentuk Sekretariat PPNS sebagai wadah pengkoordinasian PPNS serta guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Kabupaten Pasuruan.

4. Meningkatkan kualitas penyidikan melalui peningkatan Kapasitas PPNS.
5. Melaksanakan penegakan perda secara Yustisial maupun Non Yustisial dengan mengedepankan sikap etis dan humanis.
6. Memberikan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda / Perkada yang memuat sanksi di Kabupaten Pasuruan.
7. Meningkatkan intensitas patroli rutin wilayah dan kegiatan deteksi dini dan cegah dini terutama di daerah dengan tingkat kerawanan gangguan trantibum yang tinggi.
8. Pelaksanaan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi penertiban.
9. Menjalin kerjasama / kemitraan dengan lembaga diluar pemerintahan dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
10. Membentuk sinergitas program kegiatan bersama instansi teknis terkait maupun stake holder untuk optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda / Perkada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
11. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten / Kota.
12. Pemberdayaan Satgas Linmas didaerah dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas dan membantu dalam penanganan bencana daerah serta sebagai deteksi awal adanya pelanggaran Perda / Perkada di wilayah.
13. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Kesamaptaan, pelaksanaan diklat dasar Polisi Pamong Praja, Diklat teknis lainnya maupun Diklat Fungsional Pol PP dalam upaya peningkatan mutu layanan SPM sub urusan trantibum.
14. Tambahan Pos pemadam kebakaran 1 (satu) unit beserta sarana prasarana pendukung pada titik wilayah manajemen kebakaran dengan resiko kebakaran tinggi.
15. Pemenuhan adanya relawan pemadam kebakaran pada setiap desa / kelurahan di Kabupaten Pasuruan yang bertugas melakukan upaya penanganan dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran.
16. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran melalui pelaksanaan diklat Pemadam I, bimbingan teknis maupun Diklat teknis lainnya dalam upaya peningkatan mutu layanan SPM sub urusan damkar.

Keterkaitan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Tema ini disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2026 dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 sebagai berikut :

- a. (PPD-1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing.
- b. (PPD-2) Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
- c. (PPD-3) Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil.
- d. (PPD-4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, kolaboratif dan berbasis digital. Dengan memaksimalkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk meningkatkan kondusifitas wilayah agar Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai – nilai keagamaan dan kebudayaan.

Proyek Strategis yang didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah Penataan Kawasan Ibukota Bangil. bentuk kegiatan adalah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan kegiatan penertiban agar kondusifitas wilayah meningkat terutama di Wilayah Ibukota Bangil.

Keterkaitan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Pasuruan.

Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2049 pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum. Indikator Kinerja RPJMD dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1.1.1 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

1.1.2 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

1.2.1 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2026 telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tetapi pada pelaksanaannya, ada beberapa perubahan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pendanaan yang direncanakan melalui dokumen rencana kerja Tahun 2026.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang diperuntukan bagi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp. 18.730.940.725,00. Telah dilakukan analisis kebutuhan anggaran per sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan menyesuaikan pagu indikatif tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 18.730.940.725,00. Artinya Pagu Renja Tahun 2026 adalah sama dengan pagu RKPD Tahun 2026

Adapun uraian kebutuhan anggaran pada Tahun 2026 pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat disajikan pada **Tabel (2.3). Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026**, sebagaimana terlampir.

Perlu disampaikan bahwa prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dalam rangka pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran yaitu waktu tanggap (response time) 15 menit dapat terpenuhi dalam bentuk pembangunan pos layanan pemadam kebakaran beserta pemenuhan sarana prasarana di wilayah manajemen Kebakaran yang memiliki resiko Tingkat kebakaran tinggi, pemberdayaan relawan pemadam kebakaran pada setiap penanganan kejadian kebakaran dan peningkatan kapasitas SDM bagi aparaturnya Pemadam Kebakaran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja disusun melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Forum Organisasi Perangkat Daerah. Stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kinerja tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten untuk mengupdate data terakhir ke Rancangan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam menyusun Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dan juga mempertimbangkan hasil MUSRENBANG Pemerintah Daerah Final.

Dalam Rencana Kerja tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja mengakomodir hasil dari pelaksanaan Musrenbang Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 melalui program / kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.3 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.3.3 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 - 1.3.4 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 1.3.5 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
 - 1.4 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.4.3 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 2.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 didalamnya juga memuat program kegiatan yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Dimana SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu dasar pelayanan yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) dengan indikator masing – masing jenis pelayanan antara lain :

- Jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) dengan indikator SPM adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota
- Jenis pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) dengan indikator SPM adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2026 terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. SPM dengan jenis pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM), dengan program kegiatan yang mendukung :

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
 - b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - c) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
 - d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. SPM dengan Jenis pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR), dengan program kegiatan yang mendukung :

a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dengan kegiatan antara lain:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - c) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan pada ***Tabel (2.4). Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026***, sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas kebijakan nasional di RPJMN Tahun 2025 s/d Tahun 2029 yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden diantaranya adalah :

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- b. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Bentuk dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terhadap program Asta Cita Presiden dilakukan dalam bentuk kegiatan diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan Patroli rutin wilayah dalam rangka upaya deteksi dini / cegah dini adanya Pelanggaran Perda / Perkada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Penegakan Perda / Perkada dalam bentuk tindakan administratif (pemberian SP I, II, III) tindakan Non Yustisial dalam bentuk penertiban serta Kegiatan Yustisial dalam bentuk pelaksanaan sidang tipiring
3. Melakukan tahapan penyusunan Kajian RISPK dalam bentuk koordinasi maupun dalam forum rapat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah dibidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2025-2029.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah :

“Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai – nilai keagamaan dan kebudayaan”.

Sesuai dengan Tujuan Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 adalah

“Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah *“Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal.”*, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan Penanganan Kebakaran Secara Efektif.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 selain mengacu pada pernyataan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2025-

2029 juga didasarkan pada hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan adanya isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penanganan terhadap pelanggaran Perda / Perkada;
2. Meningkatkan ketaatan dan Kepatuhan masyarakat terhadap Perda / Perkada;
3. Optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam bentuk kegiatan Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban;
4. Meningkatkan sinergitas program kegiatan bersama instansi teknis terkait;
5. Pembentukan Satgas Linmas tingkat Kabupaten dalam rangka membantu Penyelenggaraan Tibumtranmas dan sebagai deteksi awal adanya pelanggaran Perda / Perkada di wilayah;
6. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha tempat hiburan (karaoke) dan usaha warung kopi yang ada di Kabupaten Pasuruan;
7. Adanya Tambahan Pos pemadam kebakaran beserta sarana prasarana pendukung pada titik wilayah manajemen kebakaran dengan resiko kebakaran tinggi;
8. Tersedianya relawan pemadam kebakaran pada setiap desa / kelurahan di Kabupaten Pasuruan;
9. Tersedianya personil pemadam kebakaran yang bertugas di pos layanan pemadam kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tersaji dalam **Tabel 3.2.A Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026** sebagaimana terlampir. Untuk Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU tersaji dalam **Tabel 3.2.B Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU** sebagaimana terlampir.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas.
- e. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.
- f. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- g. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten / Kota.
- h. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
- b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
- c. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembentukan Sekretariat PPNS.
- b. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
- d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
- e. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).
- c. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

d. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
- b. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah Program Utama dan menjadi pendukung Sasaran pertama yaitu “Meningkatnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/ Peraturan Kepala Daerah (Perkada)” Pada Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai dengan target 100%. Sasaran Kedua Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatnya Penanganan Kebakaran Secara Efektif” dengan target 100% didukung oleh program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Sasaran ketiga Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan target 82,6 dengan program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah SKPD yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat. Tugas tersebut dilakukan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman tentram dan tertib guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kegiatan Masyarakat yang kondusif dan dinamis yang harus terus dijaga dan dipelihara melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan, patroli rutin, deteksi dini cegah dini, pengamanan, pengawalan dan penertiban. Dapat disampaikan bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dilapangan Satpol PP membagi wilayah kerja menjadi 4 wilayah, yaitu :

1. Wilayah barat meliputi Kecamatan Pandaan, Bangil, Prigen, Beji, Kraton, Rembang Dan Gempol;
2. Wilayah timur meliputi Kecamatan Rejos, Grati, Nguling, Dan Lekok;
3. Wilayah tenggara meliputi Kecamatan Tosari, Puspo, Tutar, Winongan, Pasrepan, Pohjentrek Dan Gondangwetan
4. Wilayah selatan meliputi kecamatan wonorejo, kejayan, sukorejo, purwosari, purwodadi, dan tutur.

Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Perlindungan Masyarakat yang didalamnya terdapat Seksi Pemadam Kebakaran yang bertugas memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal penanganan kejadian kebakaran, penyelamatan / evakuasi terhadap korban kebakaran maupun non kebakaran. Petugas damkar dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat untuk meminimalisir dampak kerugian baik itu kerugian materiil maupun korban jiwa.

Untuk pencapaian tersebut maka diperlukan pos – pos layanan pemadam kebakaran yang berada pada wilayah dengan tingkat rawan kejadian yang tinggi. Sedangkan untuk kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki 1 unit pos layanan yang ada pada kantor induk raci. Untuk itu diharapkan pada tahun 2026 ada penambahan pos layanan pemadam kebakaran beserta sarana prasarana pendukung pos layanan damkar dan personil pemadam kebakaran yang bertugas di pos layanan pemadam kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran.

Pemberian tunjangan resiko kerja/ Tunjangan kondisi kerja perlu diberikan kepada petugas pemadam kebakaran dikarenakan pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi seperti kebakaran atau kecelakaan serta karena kondisi kerja yang ekstrem seperti suhu tinggi, asap dan kebisingan.

Pemetaan Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 disajikan sebagaimana **tabel 3.3.1** terlampir.

3.3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029. Prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan memaksimalkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk menjaga kondusifitas wilayah, agar tercipta iklim investasi yang baik. Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah *Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah..* Program Prioritas Daerah yang didukung adalah Program Prioritas Daerah “Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang responsif, kolabotratif dan berbasis digital”.

3.3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Proyek Strategis yang didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adaah Penataan kawasan ibukota Bangil". Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pendukung prioritas Pembangunan daerah disajikan melalui **Tabel 3.4 Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2026** sebagaimana terlampir.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Proyek Strategis Daerah diantaranya :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
- b) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.
- c) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

3.3.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Luasnya wilayah Kabupaten Pasuruan tentunya menjadi potensi utama dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan ditopang daerah Pantai, dataran sampai pegunungan. Hal ini menjadikan sebaran masyarakat Kabupaten Pasuruan cukup bervariasi mengikuti bentangan alam, ada yang bermukim di dekat pantai, menjalani kehidupan di daerah dataran

bahkan juga tinggal di daerah pegunungan. Tentunya dengan tersebarnya masyarakat tersebut pemerintah daerah wajib memberikan rasa yang tertib dan tentram kepada setiap masyarakatnya meskipun jauh dari pusat pemerintahan. Pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Perda/Perkada) di masyarakat seringkali menjadi penyebab terganggunya masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Gangguan yang terjadi di wilayah tidak serta merta dapat ditangani secara cepat dan akurat sehingga masyarakat merasa kelambanan pemerintah daerah terutama Satpol PP dalam menangani pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tersebut, sehingga perlu terobosan – terobosan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Inovasi “ GARDA WIBAWA ” adalah inovasi yang diusung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang berupa pasukan khusus bermotor yang diharapkan dapat bergerak / bertindak secara cepat dan tepat terhadap dugaan Pelanggaran Perda / Perkada serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka meminimalisir jumlah pelanggaran dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Penggunaan kendaraan bermotor diharapkan bergerak secara cepat dan dapat menjangkau jalan – jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) serta Tim Garda Wibawa ini dapat dikendalikan dalam 24 jam. Dalam setiap kegiatan Tim Garda Wibawa sudah dibekali surat tugas dan administrasi lainnya yang diperlukan, seperti contoh surat undangan / surat panggilan sudah wajib dibawa ketika melakukan kegiatan sehingga dapat memotong waktu dan biaya. Artinya dalam keadaan normal apabila kita menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat kita akan mengecek dulu kebenaran informasi tersebut baru setelah itu dibuatkan surat klarifikasi.

Lahirnya inovasi “GARDA WIBAWA” merupakan wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam menjawab tantangan di era serba cepat ini, sehingga pelapor tidak merasa terlalu lama penanganannya karena langsung ditindaklanjuti oleh

Satpol PP. Kecepatan dalam menangani dugaan Pelanggaran Perda / Perkada dan gangguan trantibum merupakan inovasi yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk masa yang akan datang dengan perbaikan yang diperlukan serta kegiatan ini dapat mendukung tujuan pembangunan secara berkelanjutan yang ada di Kabupaten Pasutuan.

Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** sebagaimana terlampir.

3.3.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja RPJPD

Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2049 pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2049 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung Indikator Kinerja RPJPD tersaji melalui **tabel 3.6** berikut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2026 mendukung prioritas “Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang responsif, kolabotratif dan berbasis digital” Hal tersebut harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai agar pelaksanaan pelayanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai target dan sasaran serta dapat terlaksana secara maksimal.

Jumlah Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebanyak 3 Program, jumlah Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebanyak 12 Kegiatan, jumlah Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebanyak 47 Sub Kegiatan. Untuk Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 13.901.239.161	DAU DAN PAJAK ROKOK
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 132.734.800	PAJAK ROKOK
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.820.238.238	DAU
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 192.165.600	PAJAK ROKOK
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 327.446.400	DAU DAN PAJAK ROKOK
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.066.570.448	PAJAK ROKOK
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 467.300.175	DAU dan PAJAK ROKOK

1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 894.783.500	DAU dan PAJAK ROKOK
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 3.436.950.040	PAJAK ROKOK DAN DBHCHT
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.196.088.740	PAJAK ROKOK
2.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 2.175.626.300	PAJAK ROKOK & DBHCHT
2.3	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp. 65.235.000	PAJAK ROKOK
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 1.392.751.524	DAU dan DAU SG
3.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.218.206.974	DAU
3.2	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Rp. 174.544.550	DAU DAN DAU SG
	TOTAL	Rp. 18.730.940.725	

Berikut Total Rencana kebutuhan dana/pagu indikatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang dirinci menurut sumber pendanaannya

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.901.239.161	DAU DAN PAJAK ROKOK
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.436.950.040	PAJAK ROKOK DAN DBHCHT
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.392.751.524	DAU DAN DAU SG
TOTAL		18.730.940.725	

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 serta implementasi rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada **Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

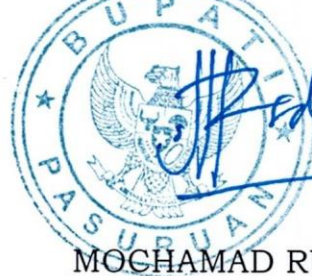
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				tdk perlu diisi				sesuai DPA 2025	sd Juni 2025	
1	Urusan Wajib									
1.05	Bidang : Ketentraman dan ketertiban umum									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	22,22%	22,22%
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%	5 dokumen	3 dokumen	50,00%
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		3 laporan	3 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	50,00%
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	41,67%	41,67%
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 Org/Bln		1274 Org/bln	1274 Org/bln	100%	91 Org/bln	91 Org/bln	10,48%
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%		0%	0%	0%	100%	0%	0,00%
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket		0 paket	0 paket	0%	1 paket	0 paket	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.06.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	41,18%	41,18%
1.05.01.2.06.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket		12 paket	12 paket	100%	12 paket	6 paket	42,86%
1.05.01.2.06.00.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	0 paket	0,00%
1.05.01.2.06.00.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	0 paket	0,00%
1.05.01.2.06.00.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket	3 paket	300%	1 paket	2 paket	200,00%
1.05.01.2.06.00.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
1.05.01.2.06.00.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	5 laporan	41,67%
1.05.01.2.06.00.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50,00%
1.05.01.2.08.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%		100%	100%	100%	100%	36,11%	36,11%
1.05.01.2.08.00.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25,00%
1.05.01.2.08.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50,00%
1.05.01.2.08.00.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.09.00 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%		100%	83,75%	83,75%	100%	31,53%	31,53%
1.05.01.2.09.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52 unit		53 unit	89 unit	167,92%	53 Unit	26 Unit	50,00%
1.05.01.2.09.00 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit		57 unit	60 unit	105,26%	57 Unit	29 Unit	90,63%
1.05.01.2.09.00 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit		0 unit	0 unit	0,00%	1 Unit	0 Unit	0,00%
1.05.02 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	79		0	0	0,00%	75	75	94,94%
1.05.02.2.01 2.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.00 03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	8 dokumen		8 dokumen	10 dokumen	125,00%	8 dokumen	5 dokumen	62,50%
1.05.02.2.01.00 04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 dokumen		40 dokumen	60 dokumen	150,00%	34 dokumen	23 dokumen	57,50%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1621 orang		1665 orang	1936 orang	0%	358 orang	745 orang	45,96%
1.05.02.2.01.00 15	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	74 laporan		70 laporan	136 laporan	194,29%	160 laporan	73 laporan	98,65%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.02.2.01.00.16	Sub Kegiatan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan		20 laporan	46 laporan	230,00%	46 laporan	41 laporan	89,13%
1.05.02.2.2.02.	Kegiatan Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	33,33%	33,33%
1.05.02.2.02.00.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	112 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00%	6 laporan	1 laporan	0,89%
1.05.02.2.02.00.11	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 laporan		58 laporan	58 laporan	100,00%	105 laporan	39 laporan	650,00%
1.05.02.2.02.00.12	Sub Kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00%	6 laporan	0 laporan	0,00%
1.05.02.2.2.03.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%		100%	100,00%	100%	100%	0%	0,00%
1.05.02.2.03.00.06	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan		3 laporan	4 laporan	133,33%	1 laporan	1 laporan	100,00%
1.05.04.2.01.00.01	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%
1.05.04.2.01.01.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	14,38%	14,38%
1.05.04.2.01.00.01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	40 dokumen		3 dokumen	2 dokumen	66,67%	3 dokumen	0 dokumen	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.04.2.01.00.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 laporan		90 laporan	269 laporan	298,89%	90 laporan	15 laporan	16,67%
1.05.04.2.01.00.17	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	399 unit		0 unit	0 unit	0%	60 unit	0 unit	0,00%
1.05.04.2.04.00.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	22%	22,00%
1.05.04.2.04.00.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 orang		278 Orang	278 Orang	100,00%	400 Org	0 Org	0,00%
1.05.04.2.04.00.02	Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/ kelurahan		110 Ds/Kel	110 Ds/Kel	100,00%	50 Ds/Kel	50 Ds/Kel	1000,00%

Pasuruan, 25 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RIDO NUGROHO, S.Sos

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19680211 198809 1 001



Tabel 2.1.A				
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025				
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
... diisi program urusan saja .. (tidak termasuk program penunjang)	target renstra 2025 dibagi target akhir periode 2026	... diambil dari tabel T- C.29 kolom 11 ...	lihat simoneva	
		... <100% (tidak memenuhi target)		
		... =100% (memenuhi target)		
		... >100% (melebihi target)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95%	94,94%	• Faktor Pendorong : Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki	• Melakukan peremajaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional melalui pemeliharaan maupun pengadaan
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100,00%		
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	100,00%	62,50%	• Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja	• Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	57,50%	• Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan	• Bidang melakukan perencanaan dengan cermat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sehingga ada keselarasan antara capaian anggaran dengan capaian kinerja
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100,00%	45,96%	• Faktor Penghambat : Adanya pergeseran anggaran di tahun berjalan akibat refocusing belanja	
Sub Kegiatan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100,00%	98,65%	• Kapasitas SDM aparaturnya Satpol PP yang tidak merata	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	100,00%	89,13%	• Adanya perubahan kebijakan ditahun berjalan	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	100,00%	33,33%		
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%	0,89%		
Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	100,00%	650,00%		
Sub Kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	100,00%	0,00%		
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	100,00%	0,00%		
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	100,00%	100,00%		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100,00%	100,00%		
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman , Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	14,38%		
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	0,00%		
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	16,67%		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100,00%	0,00%		
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100,00%	22,00%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	100,00%	0,00%		
Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	100,00%	1000,00%		

Tabel 2.2sd Juni

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Indikator SPM											
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota	-	4	4	4	4	0	0	4	4	Capaian SPM tahun 2024 atas indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota tercapai 0 % karena tidak terdapat warga yang terdampak penegakan perda
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	-	120	120	120	120	304	18	120	120	Capaian SPM tahun 2024 atas indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 100 % karena dari target SPM 2024 sebanyak 304 orang dan yang terlayani sebanyak 304 orang
3	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan									
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian IKK (outcome) tahun 2024 pada indikator Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan tercapai 100% artinya dari 202 kasus gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani selama periode Januari sd Desember 2024 yang terselesaikan sebanyak 202 kasus

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	100%	68,80%	68,90%	69,00%	68,75%	37,5%	68,90%	69,00%	Capaian IKK (outcome) Tahun 2024 pada indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tercapai 68,75% dikarenakan dari 16 Perda/ Perkada yang memut sanksi hanya 11 Perda/ Perkada yang ditegakkan Satpol PP
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian IKK (outcome) pada indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 100% artinya dari 269 kejadian kebakaran yang tertangani sebanyak 269 kejadian
	Waktu tanggap (response time) - penanganan kebakaran			15 menit/7,5 km	15 menit	15 menit	15 menit	1,23 menit	1,44 menit	15 menit	15 menit	Capaian IKK(outcome) pada indikator waktu tanggap (respontime) penanganan kebakaran dihitung dari jumlah rata - rata waktu tanggap penanganan kebakaran periode Januari sd Desember 2024

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisikan usulan Musrenbang Kabupaten				
1	<u>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</u>		<u>Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat diselesaikan.</u>	100%	
1,1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan		
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kec. Wonorejo, Kec. Pohjentrek, Kec. Winongan, Kec. Puspo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	4 kegiatan	berntuk kegiatan berupa Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan trantibum dengan melibatkan satlinmas Desa
1.1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Wonorejo, Kec. Rejoso, Kec. Gempol, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Nguling, Kec. Rembang, Kec. Lekok, Kec. Puspo	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi pembinaan dan pelatihan anggota Satlinmas Desa / Kecamatan
1.1.3	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kec. Rejoso, Kec. Nguling, Kec. Winongan, Kec. Puspo	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4 kegiatan	berntuk kegiatan meliputi Patroli rutin deteksi dini cegah dini pelanggaran Perda/ gangguan trantibum
1.1.4	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Wil. Kec. Bangil, Wil. Kec. Pasrepan, Wil. Kec. Purwosari, Kec. Rejoso, Kec. Nguling, Kec. Puspo	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	6 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi penertiban (PKL/ PSK/ Miras/ Anjal/ ODGJ/ Reklame/ Bangunan Liar)
1.1.5	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi pelatihan bersama anggota damkar dan personil lapangan BPBD
1,2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota		Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup		
1.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kraton, Kec. Winongan, Kec. Wonorejo,	Jumlah Laporan Hasil atas Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi Pembinaan dan Penyuluhan terhadap PKL

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Purwosari, Kec. Rejoso, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Nguling, Kec. Gondangwetan, Kec. Rembang, Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi Sosialisasi Perda Perkada (DBHCHT dan DAU)
1.2.3	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi pengumpulan informasi tentang BKC Ilegal
2	<u>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</u>		<u>Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran</u>		
2,1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		
2.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP, Kec. Wonorejo, Kec. Rejoso, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Nguling, Winongan, Kec. Rembang, Kec. Lekok	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	9 kegiatan	Bentuk kegiatan meliputi Sosialisasi Edukasi Pengananan Kebakaran

Tabel 3.2.A				
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan :				
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	49,12%	30%	31%
Sasaran :				
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	98,47	98,48	98,50
2. Meningkatkan Penanganan Kebakaran Secara Efektif	Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam waktu tanggap (response time)	100%	100%	100%
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,20	82,40	82,60
Indikator SPM				
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0	4	4
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	304	120	120
Indikator Kinerja Kunci (Outcome)				
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	68,75%	68,8%	68,9%
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	100,00%	100%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,15 menit	15 menit	15 menit

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPJMD dan IKU

lihat RPJMD bab 5

lihat RENSTRA PD

Indikator Sasaran RPJMD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan :						
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai – nilai keagamaan dan kebudayaan						
Sasaran :						
Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal.						
Indikator :						
Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) - IUP						
			Tujuan			
			Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	$\frac{\text{(Jumlah Gangguan Trantibum + Jumlah pelanggaran Perda/Perkada n-1) - (Jumlah Gangguan Trantibum + jumlah pelanggaran Perda/Perkada n)}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum + jumlah pelanggaran Perda/Perkada n-1}} \times 100 \%$	31%	
			Sasaran :			
			Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Skoring Penegakan Perda + Skoring Penyelenggaraan trantibum + Skoring Pemberdayaan Sumber Daya Manusia + Skoring Peningkatan Kapasitas SDM + Skoring Sarana dan prasarana + Skoring Perencanaan dan Anggaran + Skoring Akuntabilitas	98,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
			Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam waktu tanggap (response time)	$\frac{\text{Jumlah layanan penanganan kebakaran yang memenuhi waktu tanggap (response time)}}{\text{Jumlah layanan penanganan kebakaran}} \times 100 \%$	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja	82,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 3.3

lihat tabel 3.4 kolom 2

lihat tabel 3.4 kolom 2

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah.	1. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tenaga Kerja		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penataan kawasan ibukota Bangil
Indeks Kebudayaan Daerah (IKD)		2. Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Kontinyuitas Bahan Baku			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penataan kawasan ibukota Bangil
		3. Pengembangan Industri Pengolahan unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang Kompetitif,			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penataan kawasan ibukota Bangil
		4. Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang responsif, kolabotratif dan berbasis digital.		Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam waktu tanggap (response time)				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				

Tabel 3.4
Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator Sub kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik ^{**})	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18	Penataan kawasan ibukota Bangil	Satpol PP	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	6.850.500	Pajak Rokok	-	-	Bangil	bentuk kegiatan Rakor dengan instansi terkait
					Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	75 laporan	100.302.500	Pajak Rokok	-	Manaruwi, Kauman, Kalianyar, Kersikan, Dermo, Pogar, Kiduldalem, Gempeng, Raci	Bangil	bentuk kegiatan meliputi patroli, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan dan pengawasan
					Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 laporan	6.127.500	Pajak Rokok	-	Manaruwi, Kauman, Kalianyar, Kersikan, Dermo, Pogar, Kiduldalem, Gempeng, Raci	Bangil	bentuk kegiatan meliputi Penertiban (PKL, PSK, Reklame, ODGJ, Anjal)

Tabel 3.5				
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah				
Tahun 2026				
Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
GARDA WIBAWA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	16.233.000,00

Tabel 3.6 Program Pendukung IUP RPJPD

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target	Ada/ Tidak	Sub kegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	Definisi Operasional : Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum Formula perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum}} \times 100\%$	Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	60	Ada	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Kasus Pelanggaran Perda	60		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		
		Kasus Gangguan Trantibum yang diselesaikan	72	Ada	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / Kota	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Kasus Gangguan Trantibum	72		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		

**PEMETAAN NOMENKLATUR PROG/KEG/SUBKEG PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1-2850 Tahun 2025**

Perangkat Daerah

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Yang Diampu

: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	%		1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	%
1.05.01.2.01	<u>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Meningkatnya ketaatan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	<u>Persentase konsistensi indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi</u> (Jumlah indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang konsisten pada dok rencana, anggaran dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan) x 100%)	%		1.05.01.2.01	<u>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Meningkatnya ketaatan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	<u>Persentase konsistensi indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi</u> (Jumlah indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang konsisten pada dok rencana, anggaran dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan) x 100%)	%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	-	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan
1.05.01.2.02	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah</u>	<u>Persentase laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</u> (Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah laporan harus dipenuhi) x 100%)	%		1.05.01.2.02	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah</u>	<u>Persentase laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</u> (Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah laporan harus dipenuhi) x 100%)	%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	-	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029										
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	-	SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
						KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan administrasi kepegawaian.	<u>Persentase Dokumen Kepegawaian Yang Akurat dan Sesuai Ketentuan</u> (Jumlah Dokumen Kepegawaian Yang Akurat dan Sesuai Ketentuan dibagi jumlah dok kepegawaian yang harus dipenuhi x 100%)	%	-	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan administrasi kepegawaian.	<u>Persentase Dokumen Kepegawaian Yang Akurat dan Sesuai Ketentuan</u> (Jumlah Dokumen Kepegawaian Yang Akurat dan Sesuai Ketentuan dibagi jumlah dok kepegawaian yang harus dipenuhi x 100%)	%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	<u>Persentase pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah</u> Jumlah kebutuhan umum perangkat daerah dibagi jumlah rencana kebutuhan yang harus dipenuhi x 100 %	%	-	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	<u>Persentase pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah</u> Jumlah kebutuhan umum perangkat daerah dibagi jumlah rencana kebutuhan yang harus dipenuhi x 100 %	%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	-	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	-	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	-	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	-	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	-	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<u>1.05.01.2.07</u>	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai</u>	<u>Persentase sarana prasarana yang tersedia</u> (Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia dibagi jumlah Sarana Prasarana yang ditargetkan x 100 %)	%	-	<u>1.05.01.2.07</u>	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai</u>	<u>Persentase sarana prasarana yang tersedia</u> (Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia dibagi jumlah Sarana Prasarana yang ditargetkan x 100 %)	%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	-	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	-	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit
<u>1.05.01.2.08</u>	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Tersedianya jasa penunjang operasional kantor yang efektif dan efisien</u>	<u>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</u> (Jumlah jasa penunjang operasional kantor yang tersedia dibagi jumlah jasa penunjang operasional kantor yang ditargetkan x 100 %)	%	-	<u>1.05.01.2.08</u>	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Tersedianya jasa penunjang operasional kantor yang efektif dan efisien</u>	<u>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</u> (Jumlah jasa penunjang operasional kantor yang tersedia dibagi jumlah jasa penunjang operasional kantor yang ditargetkan x 100 %)	%
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	-	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	-	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan
<u>1.05.01.2.09</u>	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Terpeliharanya Sarana Prasarana kantor</u>	<u>Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik</u> (Jumlah sarana prasarana kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana yang terregister x 100 %)	%	-	<u>1.05.01.2.09</u>	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Terpeliharanya Sarana Prasarana kantor</u>	<u>Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik</u> (Jumlah sarana prasarana kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana yang terregister x 100 %)	%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	-	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan Indikator	Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan Indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	-	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	-	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	-	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit
1.05.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/ Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat diselesaikan.	%	-	1.05.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/ Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat diselesaikan.	%
1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani dan diselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum keseluruhan x 100 %)	%	-	1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani dan diselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum keseluruhan x 100 %)	%
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	-	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	-	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhir an; atau - Penonaktif an;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dokumen	-	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dokumen
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	orang	-	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	orang
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	-	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	-	1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	laporan	-	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	laporan
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab / Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati / Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	dokumen	-	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab / Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati / Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	dokumen
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	Pemutakhir an	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang
<u>1.05.02.2.02</u>	<u>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</u>	<u>Meningkatnya penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</u>	<u>Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup</u> (Jumlah Penindakan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani dibagi jumlah Penindakan pelanggaran Perda dan Perbup x 100 %)	%		<u>1.05.02.2.02</u>	<u>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</u>	<u>Meningkatnya penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</u>	<u>Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup</u> (Jumlah Penindakan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani dibagi jumlah Penindakan pelanggaran Perda dan Perbup x 100 %)	%

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029										
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
						KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	-	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	-	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	laporan	-	1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	laporan
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	-	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Persentase peningkatan kapasitas PPNS (Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi PPNS keseluruhan x 100 %)	%		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Persentase peningkatan kapasitas PPNS (Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi PPNS keseluruhan x 100 %)	%
1.05.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	dokumen		1.05.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	dokumen
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	-	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Dan Non Kebakaran	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran	%	-	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Dan Non Kebakaran	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran	%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya fasilitasi penanganan kebakaran	Persentase Fasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi (Jumlah kFasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi dibagi jumlah Fasilitas penanganan kebakaran x 100 %)	%	-	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya fasilitasi penanganan kebakaran	Persentase Fasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi (Jumlah kFasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi dibagi jumlah Fasilitas penanganan kebakaran x 100 %)	%

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029										
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur				Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
	1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator		KODE KLASIFIKASI	1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota SetiapTahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	dokumen	-	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota SetiapTahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	dokumen
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	dokumen	-	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	dokumen
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	orang	-	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	orang
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	dokumen	-	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	dokumen
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	-	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	-	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2025-2029						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	-	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	-	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa / kelurahan	-	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa / kelurahan

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
sesuai Renstra 2025-2029											
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	13.901.239.161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	13.901.239.161	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	132.734.800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	132.734.800	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	84.584.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	84.584.000	kegiatan perencanaan, Forum PD/lintas Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	48.150.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	48.150.800	Rapat evaluasi internal per tribulan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	10.820.238.238	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	10.820.238.238	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1246 org/bulan	10.820.238.238	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1246 org/bulan	10.820.238.238	Gaji, tunjangan, tambahan penghasilan bagi PNS dan PPPK 89 orang selama 12 bulan, THR dan Gaji 13
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	192.165.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	192.165.600	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	192.165.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	192.165.600	belanja PDL Pol PP dan kelengkapannya 100 stell, PDU 3 STELL
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	327.446.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	327.446.400	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	11.741.800	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	11.741.800	belanja instalasi listrik dan komponen instalasi listrik
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	33.850.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	33.850.200	belanja alat kebersihan, bahan pembersih, alat listrik
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	9.910.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	9.910.000	belanja alat rumah tangga
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	64.752.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	64.752.900	belanja ATK, bahan komputer, kertas dan cover
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	24.523.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	24.523.500	belanja bahan cetakan, beanja fotocopy
1.05.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	17.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	17.000.000	belanja surat kabar
1.05.01.2.06.0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.868.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.868.000	belanja natura dan makan tamu
1.05.01.2.06.0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan dan Luar Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	139.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan dan Luar Kab Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	139.800.000	Belanja makan rapat, perdin dalam daerah, perdin luar daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase sarana prasarana yang tersedia	100%	1.066.570.448	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase sarana prasarana yang tersedia	100%	1.066.570.448	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	817.999.998	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	817.999.998	Pengadaan mobil patroli 2 unit
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	130.607.632	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	130.607.632	Pengadaan meja kerja, kursi kerja lemari arsip dan set meja resepsionis
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	117.962.818	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	117.962.818	Pengadaan Komputer PC, laptop, Printer, Mesin Absensi, AC
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	467.300.175	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	467.300.175	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.940.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.940.000	belanja materai, buku cek, jasa publikasi
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	258.996.975	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	258.996.975	Belanja listrik, telepon, air internet
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	178.363.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	178.363.200	Honor Pengelola Keuangan, Honor Tim Teknis Pengadaan, Honor Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu,
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik	100%	894.783.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik	100%	894.783.500	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 unit	283.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 unit	283.350.000	Belanja BBM, pajak dan STNK Kendaraan, belanja Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	340.567.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	340.567.000	Belanja BBM, pajak dan STNK Kendaraan, belanja Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	25 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	25 unit	15.000.000	Pemeliharaan kursi kerja, kursi rapat, meja kerja, sofa
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	102.671.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	102.671.500	Belanja sewa ijin frekuensi HT, belanja pemeliharaan AC, CCTV, mesin PC, komputer, laptop, printer
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	153.195.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	153.195.000	Pemeliharaan Gedung Kantor
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Pasuruan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat diselesaikan.	100%	3.436.950.040	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Pasuruan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat diselesaikan.	100%	3.436.950.040	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan	100%	1.196.088.740	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan	100%	1.196.088.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 dokumen	46.184.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 dokumen	46.184.000	kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, kerjasama dengan satpol pp wilayah perbatasan dan Satpol PP propinsi
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40 dokumen	240.219.940	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40 dokumen	240.219.940	Pembinaan dan Pelatihan anggota Satlinmas, kegiatan kirab pataka HUT Propinsi, kegiatan linmas membantu penanganan bencana
1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	2 dokumen	26.999.000	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	2 dokumen	26.999.000	Kerjasama dengan TNI/POLRI/ lembaga non pemerintah dalam hal teknik penanganan pelanggaran Perda
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Pasuruan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50 orang	88.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Pasuruan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50 orang	88.000.000	Kegiatan Bimtek tentang Pemberantasan BKC Ilegal
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	160 laporan	407.474.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	160 laporan	407.474.000	belanja kegiatan patroli, deteksi dini cegah dini, pengamanan dan pengawasan
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan	64.516.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan	64.516.000	kegiatan penertiban (PSK, PKL, ODGJ, Anak Jalanan, Pengemis penertiban reklame, Bangli dan penanganan unjuk rasa
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada warga layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	6.756.000	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada warga layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	6.756.000	layanan ganti rugi materil dan layanan pengobatan bagi masyarakat terdampak penanganan perda
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 dokumen	29.999.800	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 dokumen	29.999.800	Satgas Linmas TK. Kabupaten dengan SK Kepala Daerah
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	266 orang	285.940.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	266 orang	285.940.000	peningkatan kapasitas melalui capacity building, kesamaptaan, bimtek dan diklat, kegiatan HUT Satpol PP Tk Nasional, Tingkat Propinsi dan Tk Kab.
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	2.175.626.300	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	2.175.626.300	
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil atas Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 laporan	72.547.150,00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil atas Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 laporan	72.547.150,00	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar perda
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11 laporan	495.169.490,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11 laporan	495.169.490,00	Kegiatan Sosialisasi cukai (tatap muka) 4 keg, kegiatan pemusnahan 2 keg, kegiatan sosialisasi perda 5 kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	105 laporan	1.597.597.660,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	105 laporan	1.597.597.660,00	Kegiatan Operasi pemberantasan cukai 20 kegiatan, pengumpulan informasi cukai 60 kegiatan, kegiatan penanganan Yustisial dan Non Yustisial 25 keg
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	10.312.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	10.312.000,00	kegiatan monitoring / pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda / Perkada
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	65.235.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	65.235.000	
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Pasuruan	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 dokumen	25.000.000	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Pasuruan	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 dokumen	25.000.000	Pembentukan Sekretariat PPNS
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	40.235.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	40.235.000	kegiatan peningkatan kapasitas PPNS melalui Diklat PPNS dan rakor pembinaan PPNS
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Pasuruan	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran	100%	1.392.751.524	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Pasuruan	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran	100%	1.392.751.524	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Fasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi	100%	1.218.206.974	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Fasilitas penanganan kebakaran yang terpenuhi	100%	1.218.206.974	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 dokumen	510.123.500	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 dokumen	510.123.500	Penyusunan dokumen NSPM, pemeliharaan kend damkar
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90 laporan	101.260.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90 laporan	101.260.000	keg. Penanganan kejadian kebakaran
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	40 dokumen	82.460.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	40 dokumen	82.460.000	Kegiatan penyelamatan dan animal rescue
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 orang	42.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 orang	42.000.000	Pelaksanaan Diklat Teknis / Diklat Pemadam I
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 dokumen	30.000.000	Persiapan penyusunan dokumen kajian RISPKP
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	288 unit	422.363.474	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	288 unit	422.363.474	sarana prasarana pendukung pos layanan damkar dan sarpras operasional damkar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 dokumen	30.000.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pasuruan dan Di Luar Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 dokumen	30.000.000	Kegiatan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kab. Pasuruan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	174.544.550	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kab. Pasuruan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	174.544.550	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 org	106.045.050	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 org	106.045.050	sosialisasi edukasi damkar kepada masyarakat
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50 desa/kel	68.499.500	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50 desa/kel	68.499.500	penguatan relawan damkar dan pembinaan relawan damkar
TOTAL					18.730.940.725	TOTAL					



Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Pemerintahan Wajib tang berkaitan dengan pelayanan dasar									
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					18.730.940.725				16.779.176.701
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	13.901.239.161			100%	12.537.051.651
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya ketaatan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	132.734.800			100%	72.734.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	5 Dok	Rp 84.584.000	PAJAK ROKOK	kegiatan perencanaan, Forum PD/lintas Perangkat Daerah	5 Dok	54.584.000
						Belanja operasi	: Rp 84.584.000			
						Belanja pegawai	: Rp -			
						Belanja barang dan jasa	: Rp 84.584.000			54.584.000
						Belanja bunga	: Rp -			
						Belanja subsidi	: Rp -			
						Belanja hibah	: Rp -			
						Belanja bantuan sosial	: Rp -			
						Belanja modal	: Rp -			
						Belanja tidak terduga	: Rp -			
						Belanja transfer	: Rp -			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	4 Lap	Rp 48.150.800	PAJAK ROKOK	Rapat evaluasi internal per tribulan	4 Lap	Rp 18.150.800
						Belanja operasi	: Rp 48.150.800			18.150.800
						Belanja pegawai	: Rp -			
						Belanja barang dan jasa	: Rp 48.150.800			18.150.800
						Belanja bunga	: Rp -			
						Belanja subsidi	: Rp -			
						Belanja hibah	: Rp -			
						Belanja bantuan sosial	: Rp -			
						Belanja modal	: Rp -			
						Belanja tidak terduga	: Rp -			
						Belanja transfer	: Rp -			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawaban		100%	Rp 10.820.238.238			100%	Rp 10.820.239.076
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	1246 org/bulan	Rp 10.820.238.238	DAU	Gaji, tunjangan, tambahan penghasilan bagi PNS dan PPPK 89 orang selama 12 bulan, THR dan Gaji 13	1246 orang / bulan	Rp 10.820.239.076
						Belanja operasi	: Rp 10.820.238.238			10.820.239.076
						Belanja pegawai	: Rp 10.820.238.238			10.820.239.076

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja barang dan jasa : Rp -				-
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja birokrasi dan pelayanan administrasi kepegawaian.	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	Rp 192.165.600			100%	Rp 99.180.300
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasuruan	2 Pkt	Rp 192.165.600	PAJAK ROKOK	belanja PDL Pol PP dan kelengkapannya 100 stel. PDL 3 STELL	2 Pkt	Rp 99.180.300
						Belanja operasi : Rp 192.165.600				99.180.300
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 192.165.600				99.180.300
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	Rp 327.446.400			100%	Rp 233.203.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	1 Paket	Rp 11.741.800	PAJAK ROKOK	belanja instalasi listrik dan komponen instalasi listrik	1 paket	Rp 5.500.000
						Belanja operasi : Rp 11.741.800				5.500.000
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 11.741.800				5.500.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Paket	Rp 33.850.200	PAJAK ROKOK	belanja alat kebersihan, bahan pembersih, alat listrik	12 paket	Rp 15.850.000
						Belanja operasi : Rp 33.850.200				15.850.000
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 33.850.200				15.850.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 paket	Rp 9.910.000	PAJAK ROKOK DAN DAU	belanja alat rumah tangga	1 Pkt	Rp 9.910.000
						Belanja operasi : Rp 6.910.000				9.910.000
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 6.910.000				9.910.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp 3.000.000				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 paket	Rp 64.752.900	PAJAK ROKOK	belanja ATK, bahan komputer, kertas dan cover	1 Pkt	44.752.000
						Belanja operasi : Rp 64.752.900				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 64.752.900				44.752.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	2 paket	Rp 24.523.500	PAJAK ROKOK	belanja bahan cetakan, beanja fotocopy	2 Pkt	14.523.000
						Belanja operasi : Rp 24.523.500				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 24.523.500				14.523.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Dok	Rp 17.000.000	PAJAK ROKOK	belanja surat kabar	12 Dok	15.000.000
						Belanja operasi : Rp 17.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 17.000.000				15.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	12 Laporan	Rp 25.868.000	PAJAK ROKOK	belanja natura dan mamin tamu	12 Lap	17.868.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja operasi : Rp 25.868.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 25.868.000				17.868.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	12 Laporan	Rp 139.800.000	PAJAK ROKOK	Belanja makan rapat, perdin dalam daerah, perdin luar daerah	12 Lap	109.800.000
						Belanja operasi : Rp 139.800.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 139.800.000				109.800.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai	Persentase sarana prasarana yang tersedia		100%	Rp 1.066.570.448			100%	Rp 48.125.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Pasuruan	2 unit	Rp 817.999.998	PAJAK ROKOK	Pengadaan mobil patroli	1 unit	10.000.000
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp 817.999.998				10.000.000
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasuruan	25 unit	Rp 130.607.632	PAJAK ROKOK	Pengadaan meja kerja, kursi kerja lenari arsip dan set meja resepsionis	4 unit	7.600.000
						Belanja operasi : Rp 78.271.032				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 78.271.032				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp 52.336.600				7.600.000
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	13 unit	Rp 117.962.818	PAJAK ROKOK	Pengadaan Komputer PC Printer, Mesin Absensi, AC	2 unit	30.525.000
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp 117.962.818				30.525.000
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	Rp 467.300.175			100%	Rp 497.776.975
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	12 Laporan	Rp 29.940.000	DAU	belanja materai, buku cek, jasa publikasi	12 Lap	29.940.000
						Belanja operasi : Rp 29.940.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 29.940.000				29.940.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Laporan	Rp 258.996.975	DAU	Belanja listrik, telepon, air internet	12 Lap	246.996.975
						Belanja operasi : Rp 258.996.975				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 258.996.975				246.996.975
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp 178.363.200	DAU	Honor Pengelola Keuangan, Honor Tim Teknis Pengadaan, Honor Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu,	12 Lap	220.840.000
						Belanja operasi : Rp 178.363.200				
						Belanja pegawai : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja barang dan jasa : Rp 178.363.200				220.840.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana Prasarana kantor	Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik		100%	Rp 894.783.500			100%	Rp 765.792.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasuruan	26 unit	Rp 283.350.000	PAJAK ROKOK DAU	Belanja BEM, pajak dan STNK Kendaraan, belanja Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4	26 Unit	257.554.000
						Belanja operasi : Rp 283.350.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 283.350.000				257.554.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasuruan	76 unit	Rp 340.567.000	PAJAK ROKOK DAN DAU	Belanja BEM, pajak dan STNK Kendaraan, belanja Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4	76 unit	Rp 290.567.000
						Belanja operasi : Rp 340.567.000				290.567.000
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 340.567.000				290.567.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	25 unit	Rp 15.000.000	PAJAK ROKOK	Pemeliharaan kursi kerja, kursi rapat, meja kerja, sofa	25 unit	15.000.000
						Belanja operasi : Rp 15.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 15.000.000				15.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	96 Unit	Rp 102.671.500	PAJAK ROKOK	Belanja sewa ijin frekuensi HT, belanja pemeliharaan AC, CCTV, mesin FC, perahu karet, komputer, laptop, printer	96 Unit	102.671.500
						Belanja operasi : Rp 102.671.500				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 102.671.500				102.671.500
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 Unit	Rp 153.195.000	PAJAK ROKOK	Pemeliharaan Gedung Kantor damkar dan pos jaga kantor raci	2 Unit	100.000.000
						Belanja operasi : Rp 76.035.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 76.035.000				100.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp 77.160.000				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/ Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat diselesaikan.		100%	3.436.950.040			100%	3.336.237.000
	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani dan diselesaikan		100%	1.196.088.740			100%	1.080.870.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	8 Dokumen	Rp 46.184.000	PAJAK ROKOK	kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, kerjasama dengan satpol pp wilayah perbatasan dan Satpol PP propinsi	8 Dokumen	36.184.000
						Belanja operasi : Rp 46.184.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 46.184.000				36.184.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan	40 dok	Rp 240.219.940	PAJAK ROKOK	Pembinaan dan Pelatihan anggota Satlinmas, kegiatan kirab pataka HUT Propinsi, kegiatan linmas membantu penanganan bencana	34 dok	195.000.000
						Belanja operasi : Rp 240.219.940				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 240.219.940				195.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Pasuruan	2 dok	Rp 26.999.000	PAJAK ROKOK	Kerjasama dengan TNI/POLRI/ lembaga non pemerintah dalam hal teknik penanganan pelanggaran Perda	2 dok	27.000.000
						Belanja operasi : Rp 26.999.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 26.999.000				27.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Pasuruan	50 orang	Rp 88.000.000	DBHCHT	Kegiatan Bimbingan teknis tentang pemberantasan BKC ilegal	50 orang	88.000.000
						Belanja operasi : Rp 88.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 88.000.000				88.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	160 Laporan	Rp 407.474.000	PAJAK ROKOK	Kegiatan patroli, deteksi dini, cegah dini, pengamanan, pengawasan,	160 Laporan	357.474.000
						Belanja operasi	Rp 377.474.000			
						Belanja pegawai	-			
						Belanja barang dan jasa	377.474.000			357.474.000
						Belanja bunga	-			
						Belanja subsidi	-			
						Belanja hibah	-			
						Belanja bantuan sosial	-			
						Belanja modal	30.000.000			
						Belanja tidak terduga	-			
						Belanja transfer	-			
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Pasuruan	46 Laporan	Rp 64.516.000	PAJAK ROKOK	Kegiatan operasi penertiban dan penanganan unjuk rasa	46 Laporan	54.516.000
						Belanja operasi	Rp 64.516.000			
						Belanja pegawai	-			
						Belanja barang dan jasa	64.516.000			54.516.000
						Belanja bunga	-			
						Belanja subsidi	-			
						Belanja hibah	-			
						Belanja bantuan sosial	-			
						Belanja modal	-			
						Belanja tidak terduga	-			
						Belanja transfer	-			
	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada warga layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Pasuruan	4 Laporan	Rp 6.756.000	PAJAK ROKOK	layanan ganti rugi materil dan layanan pengobatan bagi masyarakat terdampak penanganan perda	4 Laporan	6.756.000
						Belanja operasi	Rp 6.756.000			
						Belanja pegawai	-			
						Belanja barang dan jasa	6.756.000			6.756.000
						Belanja bunga	-			
						Belanja subsidi	-			
						Belanja hibah	-			
						Belanja bantuan sosial	-			
						Belanja modal	-			
						Belanja tidak terduga	-			
						Belanja transfer	-			
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten / Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kab. Pasuruan	1 dokumen	Rp 29.999.800	PAJAK ROKOK	Pembentukan Satgas linmas	1 dok	30.000.000
						Belanja operasi	Rp 29.999.800			
						Belanja pegawai	-			
						Belanja barang dan jasa	29.999.800			30.000.000
						Belanja bunga	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kab. Pasuruan	266 orang	Rp 285.940.000	PAJAK ROKOK	peningkatan kapasitas melalui capacity building, kesamaptaan, bintek dan diklat, kegiatan HUT Satpol PP Tk Nasional, Tingkat Propinsi dan Tk Kab.	266 orang	285.940.000
						Belanja operasi : Rp 285.940.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 285.940.000				285.940.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup		100%	2.175.626.300			100%	2.190.132.000
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	5 lap	Rp 72.547.150	PAJAK ROKOK	Kegiatan penyuluhan terhadap pelanggar Perda	5 lap	79.800.000
						Belanja operasi : Rp 72.547.150				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 72.547.150				79.800.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	11 lap	Rp 495.169.490	PAJAK ROKOK dan DBHCHT	Kegiatan Sosialisasi cukai (tatap muka) 4 keg, kegiatan pemusnahan 2 keg, kegiatan sosialisasi perda 4 kegiatan'	11 lap	559.800.000
						Belanja operasi : Rp 495.169.490				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 495.169.490				559.800.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Kab. Pasuruan	105 lap	Rp 1.597.597.660	PAJAK ROKOK dan DBHCHT	Kegiatan Operasi pemberantasan cukai 20 kegiatan, pengumpulan informasi cukai 60 kegiatan, kegiatan penanganan Yustisial dan Non Yustisial 25 keg	105 lap	1.540.220.000
						Belanja operasi : Rp 1.597.597.660				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 1.597.597.660				1.540.220.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp 10.312.000	PAJAK ROKOK	kegiatan monitoring / pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda / Perkada	12 Lap	10.312.000
						Belanja operasi : Rp 10.312.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 10.312.000				10.312.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Persentase peningkatan kapasitas PPNS		100%	65.235.000			100%	65.235.000
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Pasuruan	1 dokumen	Rp 25.000.000	PAJAK ROKOK	Pembentukan Sekretariat PPNS	1 dokumen	25.000.000
						Belanja operasi : Rp 25.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakdraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 25.000.000				25.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Pasuruan	2 Lap	Rp 40.235.000	PAJAK ROKOK	kegiatan peningkatan kapasitas PINS melalui Diklat PINS dan rakor pembinaan PINS	2 Lap	40.235.000
						Belanja operasi : Rp 40.235.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 40.235.000				40.235.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya penanggulangan kejadian kebakaran	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran		100%	Rp 1.392.751.524			100%	Rp 905.888.050
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penanganan kejadian kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran		100%	Rp 1.218.206.974			100%	Rp 731.343.500
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Kab. Pasuruan	2 dok	Rp 510.123.500	DAU	Penyusunan dokumen NSPM, pemeliharaan kend damkar	2 dok	400.123.500
						Belanja operasi : Rp 510.123.500				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 510.123.500				400.123.500
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	Kab. Pasuruan	90 Lap	Rp 101.260.000	DAU	keg. Penanganan kejadian kebakaran	90 Lap	101.260.000
						Belanja operasi : Rp 101.260.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 101.260.000				101.260.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kab. Pasuruan	40 dokumen	Rp 82.460.000	DAU	Kegiatan penyelamatan dan animal rescue	40 dokumen	82.460.000
						Belanja operasi : Rp 82.460.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 82.460.000				82.460.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Pasuruan	4 orang	Rp 42.000.000	DAU	Pembinaan aparatur damkar	4 orang	42.000.000
						Belanja operasi : Rp 42.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 42.000.000				42.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Pasuruan	1 dokumen	Rp 30.000.000	DAU	Persiapan penyusunan dokumen kajian RISPKP	1 dokumen	30.000.000
						Belanja operasi : Rp 30.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 30.000.000				30.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Pasuruan	288 unit	Rp 422.363.474	DAU	sarana prasarana pendukung pos layanan damkar dan sarpras operasional damkar	65 unit	45.500.000
						Belanja operasi	Rp 130.575.000			45.500.000
						Belanja pegawai	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	Rp 130.575.000			45.500.000
						Belanja bunga	Rp -			
						Belanja subsidi	Rp -			
						Belanja hibah	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	Rp -			
						Belanja modal	Rp 291.788.474			
						Belanja tidak terduga	Rp -			
						Belanja transfer	Rp -			
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasuruan dan Luar Kab Pasuruan	5 dokumen	Rp 30.000.000	DAU	Kegiatan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 dokumen	30.000.000
						Belanja operasi	Rp 30.000.000			30.000.000
						Belanja pegawai	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	Rp 30.000.000			30.000.000
						Belanja bunga	Rp -			
						Belanja subsidi	Rp -			
						Belanja hibah	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	Rp -			
						Belanja modal	Rp -			
						Belanja tidak terduga	Rp -			
						Belanja transfer	Rp -			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100%	Rp 174.544.550			100%	Rp 174.544.550
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Pasuruan	400 Orang	Rp 106.045.050	DAU SG	sosialisasi edukasi damkar	400 Orang	106.045.050
						Belanja operasi	Rp 106.045.050			
						Belanja pegawai	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	Rp 106.045.050			106.045.050
						Belanja bunga	Rp -			
						Belanja subsidi	Rp -			
						Belanja hibah	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	Rp -			
						Belanja modal	Rp -			
						Belanja tidak terduga	Rp -			
						Belanja transfer	Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10) (11)
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Pasuruan	50 Desa/Kel	Rp 68.499.500		DAU	pengukuhan relawan damkar dan pembinaan relaan damkar, pemberian sarana prasarana damkar tiap desa / kelurahan	50 Desa/Kel 68.499.500
						Belanja operasi : Rp 68.499.500				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 68.499.500				68.499.500
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
						Total Belanja operasi :				
						Belanja pegawai : Rp 10.820.238.238				Rp 10.820.239.076
						Belanja barang dan jasa : Rp 6.520.454.597				Rp 5.910.812.625
						Belanja bunga : Rp -				Rp -
						Belanja subsidi : Rp -				Rp -
						Belanja hibah : Rp -				Rp -
						Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
						Total Belanja modal : Rp 1.390.247.890				Rp 48.125.000
						Total Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
						Total Belanja transfer : Rp -				Rp -
						Total Belanja PD : Rp 18.730.940.725				Rp 16.779.176.701